

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK AMIL PENGELOLA ZAKAT ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

GITA OCTAVIA ANDINI

Dalam pengelolaan zakat, keterlibatan amil sebagai pihak yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dinilai sebagai peran yang penting. Seorang Amil Zakat diangkat dan disahkan oleh pemerintah (Imam) yang memiliki wewenang. Namun terdapat permasalahan yang muncul ketika terdapat Amil Zakat yang berada di suatu Pengelola Zakat di Bandar Lampung yang tidak diangkat dan disahkan oleh pemerintah (Imam). Kehadiran Amil Zakat yang tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan ini menimbulkan keraguan mengenai hak amil yang didapat amil sebagai bagian dari mustahik zakat

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah pengurus masjid yang melakukan pengelolaan zakat tapa seizin BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan sekunder guna menarik hasil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pemberian hak amil pada pengelola zakat ilegal di Kota Bandar Lampung, yang pertama pemberian hak amil ditujukan kepada para panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat dengan sumber dana hak amil tersebut sepenuhnya berasal dari zakat yang telah terkumpulkan, baik yang dipisahkan sejak awal dana zakat terkumpul maupun yang merupakan sisa dari dana zakat yang telah dibagikan ke fakir miskin. Yang kedua bahwa panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat tidak memiliki hak atas dana zakat yang diperuntukan untuk amil zakat, karena panitia zakat tersebut bukanlah amil zakat.

Kata Kunci : Pengelola Zakat, Hak Amil

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE AMIL RIGHTS OF ILLEGAL ZAKAT MANAGER IN BANDAR LAMPUNG

By

GITA OCTAVIA ANDINI

In the management of zakat, the involvement of amil as a party that collects, manages and distributes zakat funds is considered as an important role. An Amil Zakat is appointed and authorized by the government (Imam) who has authority. However, there are problems that arise when there is an Amil Zakat who is in a Zakat Manager in Bandar Lampung who is not appointed and approved by the government (Imam). The presence of Amil Zakat which is not in accordance with what is required in Islamic law and these laws and regulations raises doubts about the amil rights that amil gets as part of mustahik zakat.

This study uses a normative-empirical approach. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data. The informants in this study were mosque administrators who managed zakat without permission from the National Amil Zakat Agency for the City of Bandar Lampung. This research analyzes data qualitatively, namely analyzing primary and secondary data to draw conclusions.

The results of this study are in the implementation of granting amil rights to ilegal zakat managers in Bandar Lampung City, the first is that the granting of amil rights is addressed to mosque committees who act as amil zakat with the source of funds for amil rights completely coming from zakat that has been collected, whether separated since the beginning of the collected zakat funds and which is the rest of the zakat funds that have been distributed to the poor. The second is that the mosque committee that acts as amil zakat does not have the right to zakat funds intended for amil zakat, because the zakat committee is not an amil zakat.

Keyword : Zakat Administrator, Rights of the Zakat Administrator